

**KEBIJAKAN PEMKOT PADA PENDIDIKAN ANAK JALANAN  
(Studi Kasus Pemerintah Kota Surakarta)**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Oleh:**

**Achmad Nurhidayat**  
**Q. 100 090 190**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2012**

PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

KEBIJAKAN PEMKOT PADA PENDIDIKAN ANAK JALANAN  
(Studi Kasus Pemerintah Kota Surakarta)

Telah disetujui oleh Pembimbing

Pembimbing I,



Prof. Dr. Yetty Sarjono, M.Si.

Surakarta, 2 Oktober 2012  
Pembimbing II,



Drs. Dahlan Rais, M.Hum.

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2012

**SURAT PERNYATAAN**  
**PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan ini, saya:

Nama : Achmad Nurhidayat  
NIM : Q. 100 090 190  
Fakultas/ Jurusan : Manajemen Pendidikan  
Jenis : Tesis  
Judul : Kebijakan Pemkot Pada Pendidikan Anak Jalanan  
(Studi Kasus Pemerintah Kota Surakarta)

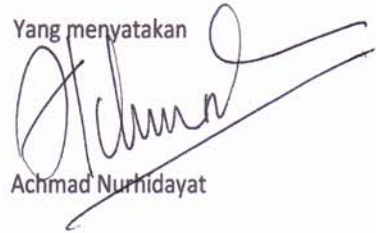
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 5 September 2012

Yang menyatakan

  
Achmad Nurhidayat

## **ABSTRACT**

ACHMAD NURHIDAYAT, "Kebijakan Pemerintah Kota Pada Pendidikan Anak Jalanan" (Studi kasus Pemerintah Kota Surakarta), *Educational Management Master Thesis, Graduate Program, University of Muhammadiyah Surakarta, 2012.*

*This study aimed to describe the planning, learning and management constraints in Surakarta government policy on the education of street children.*

*Qualitative research method, which uses a naturalistic approach to search and find the meaning or understanding of the phenomenon of street children's lives. Design in the ethnographic study, because the researcher wanted to describe the habits of local government policy on the education of street children in Surakarta City Government.*

*The results showed that areas of Surakarta City Government has made education plans include setting up street children shelter and education scholarship program for street children. The problem faced was the lack of human resources is really potentially in managing children streets, especially in the field of education. In addition to the shelters are still many street children who feel their lives are not unfettered and free. While the Street Children Education policy model are: 1) The local government of Surakarta City has implemented educational planning street children in the city of Surakarta to establish shelter and provide educational scholarship program for street children. 2) The learning process of education of street children in the city of Surakarta implemented through formal education and also provide skills education. 3) City Government as regulator, has entered into a collaboration with educational institutions street children, so that the program can run more leverage, because it is supported by all elements of society.*

*Key Words: education policy, street children, the City Government of Surakarta.*

## **Pendahuluan**

Krisis multidimensional yang melanda negeri Indonesia, telah membawa perubahan yang sangat signifikan bagi hidup dan kehidupan umat manusia. Akibatnya, berbagai persoalan sosial khususnya sektor ekonomi dirasakan semakin berat dan melanda hampir seluruh komponen masyarakat. Hal ini pula membuat sebagian masyarakat semakin terpinggirkan dan semakin tidak berdaya menghadapi problem yang semakin berat.

Ketidakberdayaan kelompok masyarakat terpinggirkan tersebut menimbulkan masalah bagi diri dan lingkungannya. Mereka menjadi beban masyarakat di sekitarnya atau tempat mereka berada. Hal tersebut dikarenakan tidak mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Sebagian lain mencari keuntungan di kota dengan suatu harapan untuk memperbaiki taraf hidup. Tetapi kenyataannya mereka tidak menjadi lebih baik dan apa yang mereka harapkan tidak terwujud, dikarenakan mereka tidak memiliki dasar pendidikan dan keterampilan yang memadai.

Anak jalanan merupakan salah satu produk dari kondisi sosial tersebut diatas. Disamping itu krisis ekonomi yang berkepanjangan, semakin meningkatkan jumlah anak jalanan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini dapat dilihat di persimpangan jalan, sekitar terminal, stasiun kereta api, pasar dan tempat keramaian lainnya. Mereka mencari nafkah di tempat tersebut, untuk bertahan hidup atau membantu kehidupan keluarganya.

Permasalahan utama dari munculnya masalah sosial anak jalanan di Kota Surakarta diantaranya disebabkan karena: (1) Krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan, khususnya sektor jasa dan terkenanya Pemusatan Hubungan Kerja (PHK) para orang tua yang selama ini menjadi tulang punggung mata pencaharian/nafkah (2) Semakin meningkatnya jumlah anak yang sekolah (3) Munculnya masalah-masalah sosial lainnya sebagai akibat dari pergaulan jalanan, seperti narkoba, perkelahian, kriminal dan sebagainya.

Fenomena anak jalanan sudah merupakan hal biasa yang sudah sering dijumpai pada sejumlah kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan anak jalanan

merupakan permasalahan yang sangat kompleks bagi kita semua. Permasalahan ini sudah bukan merupakan masalah bagi pemerintah saja, namun sudah merupakan tanggung jawab kita semua. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak).

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 1998 memperlihatkan bahwa anak jalanan secara nasional berjumlah sekitar 2,8 juta anak. Dua tahun kemudian, tahun 2000, angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 5,4%, sehingga jumlahnya menjadi 3,1 juta anak. Pada tahun yang sama, anak yang tergolong rawan menjadi anak jalanan berjumlah 10,3 juta anak atau 17,6% dari populasi anak di Indonesia, yaitu 58,7 juta anak (Soewignyo, 2002).

Pembinaan pendidikan anak jalanan di Kota Surakarta, dilakukan dalam satu suatu wadah pembelajaran yang menggabungkan beberapa fungsi dalam satu wadah. Dalam hal ini fungsi pendidikan dilakukan melalui pemberian materi pembelajaran dasar/pendidikan dasar 9 tahun dan program kejar paket. Selain itu juga pengembangan diri melalui pemberian keterampilan serta penyediaan sarana pengembangan minat dan bakat, serta didukung fungsi lain yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak.

Fokus Penelitian ini antara lain bagaimanakah perencanaan pendidikan, proses pembelajaran pendidikan dan kendala dalam pengelolaan pendidikan anak jalanan di kota Surakarta.

Menurut Ahira (2010:6) anak jalanan merupakan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Anak jalanan merupakan seseorang maupun sekumpulan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk mencari nafkah maupun hanya untuk berkeliaran di jalanan. Keberadaan anak jalanan terkait banyak faktor, salah satunya adalah kemiskinan (Novri, 2010:12).

Fenomena kehidupan anak jalanan tersebut, merupakan salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Kota Surakarta sebagai kota budaya. Upaya pemerintah kota Surakarta sudah dilakukan, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan anak jalanan tersebut dengan baik, terbukti sampai sekarang belum diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kesejahteraan anak jalanan. Keluarnya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, membawa konsekuensi kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan seluruh ketentuan tentang hak anak yang terdapat dalam konvensi PBB tanggal 20 November 1989.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Pendekatan yang digunakan adalah naturalistik sedang upaya dan tujuannya adalah memahami suatu fenomena dalam suatu konteks khusus (Moleong, 2007:5). Sifat kualitatif lebih cocok untuk menghadapi realitas yang jamak, multi perspektif. Sehingga penelitian semacam ini mampu memperlihatkan secara langsung hubungan transaksi antara peneliti dengan yang diteliti yang memudahkan pencarian kedalaman makna (Sutopo 2005: 35). Digunakannya etnografi dalam penelitian ini, karena peneliti ingin mendeskripsikan kebiasaan-kebiasaan tentang kebijakan pemkot pada pendidikan anak jalanan di Pemerintah Kota Surakarta.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surakarta Jawa Tengah, secara khusus dilakukan pada Dinas Pemerintah dan LSM terkait bidang pendidikan anak jalanan di Kota Surakarta. Alasan pemilihan di Kota Surakarta antara lain, Kota Surakarta jumlah anak jalanan dari waktu ke waktu semakin banyak, Kota Surakarta dari kurun waktu 2005-2012 paling tidak telah mendapat 13 penghargaan dari berbagai instansi terkait penataan PKL, yang notabene sebagian anak-anak mereka menjadi anak jalanan dan khalayak belum banyak tahu, ternyata Pemerintah Kota Surakarta juga telah melakukan solusi permasalahan pendidikan dan kesehatan terhadap anak-anak jalanan.

Informasi dapat diperoleh secara tepat dan objektif setiap *interviewer* (pencari informasi) harus mampu menciptakan hubungan baik dengan *interviewee* (sumber informasi) atau mengadakan *raport* yaitu suatu situasi psikologis yang menunjukkan bahwa *interview* bersedia bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi informasi sesuai dengan pikiran dan memberi informasi sesuai dengan pikiran dan keadaan yang sebenarnya (Margono, 2005:165). Wawancara mendalam dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali data tentang aktivitas anak jalanan yang berkaitan dengan pendidikan anak. Adapun langkah-langkah dalam wawancara mendalam adalah dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dan *key* informan hal-hal terkait dengan kebijakan pemkot pada pendidikan anak jalanan di Pemerintah Kota Surakarta

Data yang diperoleh dari penelitian, dianalisis mulai dengan matrik meta tak tertata, yaitu cara merangkum informasi dasar dari beberapa situs atau kasus ke dalam satu bagan besar. Kemudian mempertimbangkan beberapa jenis matrik tertata yaitu matrik deskriptif situs tertata, di mana situs dipisah dari yang tinggi sampai yang rendah berdasarkan variabel terpenting (Miles dan Huberman, 2007:280). Data yang ada dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif artinya mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan kualitas kebenarannya, kemudian menggambarkan dan menyimpulkan hasilnya, digunakan untuk memecahkan permasalahan pokok penelitian, selanjutnya diuraikan dalam bentuk bahasa diskriptif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus (Miles dan Huberman, 2007:101).

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Merujuk pada data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik Surakarta pada tahun 2009, tentang asal dan tempat tinggal anak jalanan dampingan mereka menunjukkan bahwa kebanyakan anak jalanan memang berasal dari dalam Kota Surakarta yakni sebanyak 108 orang, yang berasal dari sekitar Kota Surakarta sebanyak 126 orang, sebanyak 59 orang berasal dari Kota lain dan yang tak diketahui asalnya sebanyak 27 orang.



Hasil rekapitulasi Bagian Sosial Kota Surakarta tahun 2010 ada sekitar 357 anak jalanan, yang terdiri dari 299 anak jalanan laki-laki dan 58 anak jalanan perempuan yang tersebar dalam 5 kecamatan se-Kota Surakarta. Gelandangan 21 tahun keatas) berjumlah 218 orang (2010) yang tersebar di 49 titik mangkal di Kota Surakarta. Jumlah gelandangan yang paling banyak ada di Mojosongo yakni sebanyak 31 orang. Usia anak jalanan bervariasi, berkisar antara 4–17 tahun. Data dari Badan Pusat Statistik Surakarta menunjukkan bahwa usia anak jalanan yang didampinginya selama Bulan Januari–Desember 2011 di beberapa tempat pendampingan dengan usia anak jalanan yang paling banyak ada pada level usia 13 tahun yakni sebanyak 45 anak, dari total pantauan 232 anak hingga tahun Desember 2011.

Tingkat pendidikan anak jalanan bervariasi, ada yang masih bersekolah di tingkat SD, SLTP, SLTA ataupun mereka sudah keluar dan tidak bersekolah lagi, ada yang masih duduk di Taman Kanak-Kanak (TK) dan bahkan ada pula yang belum bersekolah. Anak jalanan yang didampingi oleh Badan Pusat Statistik Surakarta 2011 yang sudah tak bersekolah lagi berjumlah 55 orang yakni antara lain; keluar SD sebanyak 52 orang atau sekitar 94,5%, SLTP 2 orang atau sekitar 3,5% dan SLTA sebanyak 1 orang atau sekitar 2%. Sedangkan berdasar data dari LSM terkait sebanyak 167 anak, terdiri masih sekolah SD sebanyak 66 orang atau sekitar 39,5%, SLTP 14 orang atau sekitar 8,4%, SLTA sebanyak 1 orang atau sekitar 0,5%, TK sebanyak 2 orang atau 1,2%, belum sekolah 14 orang atau sekitar 8,4%, tidak sekolah 13 orang atau 7,8% dan yang tak diketahui sebanyak 57 orang atau sekitar 34,2%.

Untuk mempertahankan hidup, anak-anak yang hidup di jalanan biasanya melakukan aktivitas tertentu seperti mengamen, mengemis, menggelap kaca, jualan koran, parkir dan lain sebagainya. Data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik Surakarta 2010, menunjukkan bahwa sebanyak 232 anak jalanan terdiri 87 anak atau sekitar 37,5% melakukan aktivitas mengamen, 94 anak atau sekitar 40,5% mengemis, jual koran 12 anak atau sekitar 5,2%, tak beraktivitas sebanyak 6 anak atau sekitar 2,5% dan yang tak diketahui aktivitasnya sebanyak 33 anak atau sekitar 14,3%.

Keputusan kebijakan yang berhubungan dengan anak jalanan antara lain pembentukan Konsorsium yaitu gabungan dari beberapa institusi/SKPD/lembaga/organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak diantaranya adalah PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta). Selain itu kerjasama lembaga sosial masyarakat. Pemberian subsidi pendidikan dan kesehatan Pemerintah Kota Surakarta, khususnya pada Dinas Sosial dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 anggaran untuk pelayanan sosial dan kesejahteraan sebesar Rp. 109.895.000 yang terus bertambah dan pada tahun 2011 anggaran tersebut tetap, namun ada penambahan dana khusus sebesar Rp. 40.000.000,- yang digunakan untuk perlindungan sosial dan bantuan hukum bagi korban eksploitasi (Dokumen Dinas Sosial Surakarta, 2011). Adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa pendidikan anak jalan di Kota Surakarta selalu mendapat perhatian dari pemerintah kota yang disalurkan dari Dinas Sosial.

Berkaitan dengan hasil penelitian di lapangan dan teori tentang aktor pelaksana kebijakan publik, maka pelaksana kebijakan Pemkot Surakarta tentang anak jalanan dibagi menjadi dua yaitu; birokrasi (pemerintah) Kota Surakarta dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Sosial Setda Kota Surakarta dan obyek kebijakan itu sendiri (warga masyarakat) antara lain anak jalanan, masyarakat umum, dan LSM yang bergerak di bidang sosial.

Dalam penelitian terungkap bahwa tidak semua kebijakan Pemerintah Kota Surakarta tentang anak jalanan dapat implementasikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Ada kebijakan yang dapat dilaksanakan dan adapula kebijakan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan. Kebijakan Pemkot Surakarta dalam menangani anak jalanan dapat oleh peneliti golongan menjadi keputusan Kebijakan (*policy demand*), antara lain pembentukan tim koordinasi penanggulangan tuna sosial, kerjasama dengan rumah singgah atau lsm dan pelayanan dan rehabilitasi sosial

Kegiatan peningkatan rehabilitasi sosial mempunyai target dan sasaran yang ingin dicapai. Target yang ingin dicapai adalah terlaksananya kegiatan operasi gepeng, termasuk anak jalanan. Selama ini, kegiatan peningkatan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan oleh Pemkot Surakarta, antara lain melalui operasi dan razia

terhadap PGOT (pengemis, gelandangan dan orang terlantar termasuk anak jalanan) yang dilakukan minimal empat kali setiap bulan. Bantuan pembinaan Anak Jalanan mempunyai target yaitu terlaksananya pembinaan anak jalanan. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah anak jalanan terbina di rumah singgah. Kegiatan Pembinaan dilakukan oleh Pemkot melalui ceramah, dialog-dialog antara Pemkot, anak jalanan, LSM dan orang tua anak jalanan. Selama ini pembinaan terhadap anak jalanan dapat dilaksanakan oleh Pemkot baik dengan atau tanpa koordinasi dengan LSM atau rumah singgah.

Bantuan dana Pemberdayaan (modal usaha) diberikan Pemkot kepada anak jalanan yang produktif atau yang mau berusaha, seperti mereka yang usaha berjualan koran, berjualan makanan dan minuman, buka bengkel dan sebagainya. Pos perkiraan Bantuan Pembinaan Anak Jalanan. Tahun 2010, jumlah uang untuk modal usaha adalah sebanyak Rp. 500.000,- dibagikan untuk 20 anak jalanan. Modal usaha juga diberikan pada orang tua anak jalanan dengan syarat-syarat tertentu. Antara lain telah mempunyai ketrampilan tertentu, misal tambal ban, jualan kue, jualan Koran dan sebagainya. Dana bantuan ini dikenal dengan nama Bantuan Pemberdayaan Orang tua anak jalanan, jumlahnya sama dengan dana pemberdayaan anak jalanan yakni sebesar Rp. 500.000,-.

Dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta (2011) melalui Dinas Sosial yang mencapai Rp. 100.000.000,- tersebut belum dapat secara langsung mengenai secara langsung pendidikan anak jalanan sebagaimana yang diinginkan oleh Perintah Kota Surakarta. Dana tersebut masih lebih banyak dipergunakan sebagai persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga fokus terhadap pendidikan anak jalanan itu sendiri belum sepenuhnya tepat mengenai sasaran.

Tahun 2011 Walikota mengeluarkan kebijakan untuk 'merumahkan' anak jalanan di rumah singgah. Rumah singgah (panti khusus anak jalanan) tersebut akan dibuat karena jumlah anak jalanan di Kota Surakarta jumlahnya semakin bertambah. Sejumlah hal yang diperlukan untuk mendukung rencana Pemkot untuk 'merumahkan' anak jalanan telah dipersiapkan seperti lahan dan dana.

Sebelum panti tersebut direalisasikan, Pemkot mengadakan pendataan dan sosialisasi kepada anak jalanan, guna mengetahui kondisi dan keinginan mereka. Namun, setelah diadakan penelitian ternyata sebagian besar anak jalanan tidak mau hidup di Panti, karena mereka menganggap bahwa hidup di jalan lebih enak, terasa bebas untuk memenuhi kebutuhan hidup, dibanding harus hidup di panti yang ruang gerak mereka akan dibatasi. Mengetahui sikap anak jalanan yang tidak antusias, akhirnya kebijakan yang masih dalam tahap ide atau gagasan ini kemudian batal. Sehingga kebijakan Pemkot untuk merumahkan anak jalanan dalam Panti khusus belum dapat diimplementasikan tahun 2011 dan akan di realisasikan tahun 2012, dengan diawali disyahkannya Perda tentang kebijakan anak jalanan di Kota Surakarta.

Selain pemberian dana pemberdayaan, Pemkot Surakarta juga memberikan subsidi pendidikan berupa beasiswa yang diberikan melalui Dinas Pendidikan masing-masing anak menerima Rp 35.000 per bulan. Sedangkan subsidi kesehatan diberikan kepada warga miskin dengan berobat murah atau bahkan gratis di puskesmas-puskesmas. Sejauh ini kebijakan tersebut sudah dapat dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya anak jalanan ataupun warga miskin lain menerima subsidi tersebut.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Surakarta tentang anak jalanan tidak dapat sepenuhnya dapat dilaksanakan baik oleh aktor kebijakan (pemerintah) maupun obyek kebijakan (masyarakat, LSM, rumah singah, anak jalanan dan masyarakat umum). Kebijakan yang sudah dilaksanakan antara lain pembentukan Tim Penanggulangan Tuna Sosial Kota Surakarta, kerjasama dengan rumah singgah dan LSM, pemberian bantuan pemberdayaan anak jalanan dan orangtua anak jalanan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberian subsidi pendidikan dan subsidi kesehatan. Sedangkan kebijakan yang belum dapat dilaksanakan antara lain rencana pembuatan panti khusus anak jalanan dan larangan pemberian uang kepada anak jalanan di jalan.

Dukungan menjadi hal yang sangat penting manakala sebuah kebijakan dikeluarkan. Dukungan berasal dari pelaksana kebijakan itu sendiri (pemerintah) dan obyek kebijakan (masyarakat). Berkaitan dengan hasil penelitian, rencana

pembuatan panti belum dapat diimplementasikan karena kurangnya dukungan dari masyarakat yakni anak jalanan. Anak jalanan menolak dirumahkan karena hal itu akan mengekang kebebasan mereka untuk hidup bebas di jalan.

Dalam implemtasi program pendidikan anak jalanan yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta tersebut tindakan yang dilakukan oleh lembaga sosial kemasyarakatan melalui LSM masih dalam taraf mengajak dan bukan sebagai kewajiban. Sehingga yang terjadi selama ini adalah banyak anak jalanan yang keluar masuk dan tidak menetap di Rumah Singgah tersebut sehingga program yang dijalankan belum maksimal.

Berdasarkan data yang ada di Dinas Sosial Pemerintah Kota Surakarta, hanya sekitar 67,45% dari total anak jalanan yang ada di wilayah Kerja Pemerintah Kota Surakarta yang dapat ditangani. Beberapa hal yang menjadi penyebab hal tersebut diantaranya adalah mobilitas anak jalanan yang cukup tinggi. Mobilitas atau perpindahan anak jalanan dari satu lokasi ke lokasi lain bahkan antara kota menyulitkan pendataan yang dilakukan dan belum sepadan dengan program yang dijalankan dan luas wilayah kota dengan titik persebaran komunitas anak jalanan yang setiap saat terus bertambah sertajuga faktor ekonomi sebagai pemacu utama munculnya anak jalanan, menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan data terbaru serta terakurat terhadap perkembangan anak jalanan di Kota Surakarta.

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Pemerintah daerah Kota Surakarta telah melaksanakan perencanaan pendidikan anak jalanan di Kota Surakarta dengan mendirikan rumah singgah dan melakukan program beasiswa pendidikan untuk anak jalanan. Diharapkan dengan adanya program tersebut anak jalanan berkesempatan dapat menuntut ilmu dan menjadi lebih baik kedepannya. Proses pembelajaran pendidikan anak jalanan di Kota Surakarta dilaksanakan tidak saja melalui saluran pendidikan formal dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan namun juga dilakukan dengan mendirikan rumah singgah. Dengan adanya rumah singgah tersebut diharapkan kehidupan anak jalanan dapat lebih

tertata dengan baik dan dapat menata kehidupan yang lebih baik lagi dimasa depan.

Kendala dalam pengelolaan pendidikan anak jalanan di Kota Surakarta adalah sebagai berikut masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang benar-benar berpotensi dalam mengelola anak jalannya, khususnya dalam bidang pendidikan, anak jalanan merasa telah terbiasa hidup bebas dan mampu bertahan dalam kondisi kehidupan mereka seperti saat ini, sehingga merasa terkekang jika harus mengikuti peraturan yang membatasi ruang gerak mereka dan belum maksimalnya pelaksanaan peraturan dan perundangan yang telah ada oleh aparat pemerintahan serta kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga yang telah terlebih dahulu bergerak dalam pengelolaan pendidikan anak jalanan.

Hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan lebih baik, dengan lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan pendidikan anak jalanan. Pendidikan yang dilakukan juga seharusnya dapat memberikan gambaran mengenai masa depan yang lebih baik dan dilakukan secara kontinu dan bukan secara temporer saja. Pemberian pendidikan kepada anak jalanan juga dilakukan dengan memberikan bantuan permodalan dan penyaluran akan bakat dan wirausaha yang dilaksanakan oleh anak jalanan itu sendiri sehingga mereka tidak kembali sebagai anak jalanan untuk mendapatkan nafkah, dimasa yang akan datang. Membentuk lembaga ombudsman daerah bidang kesejahteraan anak, untuk menjadi kekuatan kontrol dalam kebijakan pemenuhan, penghormatan dan penegakan hak pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya anak jalanan. Mengeluarkan peraturan daerah yang mewajibkan anak jalanan untuk sekolah secara gratis tanpa dipungut biaya, menyediakan anggaran yang khusus untuk penanganan anak jalanan, menambah sarana penunjang lain, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kondisi anak jalanan. Kepada peneliti akan datang, diharapkan dapat meneliti kebijakan publik lainnya terkait anak jalanan dan bagaimana implikasi kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Demikian yang dapat penulis paparkan mengenai Kebijakan Pendidikan Anak Jalanan di Kota Surakarta, yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul artikel ini.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Prof. Dr. H. Yetty Sarjono, M.Si., dan Drs. H. Dahlan Rais M.Hum yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, saran-saran dan koreksi-koreksi kepada penulis terhadap artikel ini. Penulis juga sangat berterima kasih kepada semua pembaca yang berkenan memberikan kritik dan saran mengenai penulisan makalah, maupun isi dari makalah ini. Semuanya demi kebaikan dan akan penulis gunakan perbaikan terhadap makalah serupa dikesempatan selanjutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis dan juga para pembaca yang budiman pada umumnya.

#### **Daftar Pustaka**

- Ahira, Anne, 2010, *Anak Jalanan*, <http://www.anneahira.com>
- Ahira, Anne, 2010, *Mengintip Metode Pendidikan Anak di Lingkungan Keluarga*, <http://debu.com/berita-uncategorized>
- Alsa, Asmadi, 2004. *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif serta Kombinasinya dalam penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anonymous, 2005, *Promotion of Improved Learning Opportunities For Street Children of Indonesian*, Directorate of Community Education Directorate General Out-of-School Education and Youth Ministry of National Education, UNESCO
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Rineka Cipta, Jakarta
- Boaten, Agya B., 2011, *Surviving in the Streets; the Story of a Street Girl from Ghana*, International Journal of Humanities and Social Science
- Boaten, Agya B., 2008, *Street Children; Experiences from the Street of Accra*, research Journal of International Studies
- Children, 2002, *The Private Sector As Service Provider And Its Role in Implementing Child Rights*, Office of the High Commissioner for Human Rights Palais Wilson, Geneva.
- Daryanto, 2004, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Penerbit Apollo.
- Dwiyanto, Agus dkk, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Pusat Studi dan Kependudukan dan Kebijakan UGM : Yogyakarta

- Fischbach, Detlef Schoder, Peter A. Gloor, 2009, *Analysis Of Informal Communication Networks A Case Study*, Business & Information Systems Engineering, Bise-Research Paper.
- Gore, Jennifer, James Ladwig, Tom Griffiths and Wendy Amosa, 2007, *Data-Driven Guidelines For High Quality Teacher Education*, Paper presented at the Australian Association for Research in Education conference.
- Hamalik, Oemar, 2007. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Jalal, Fasli, 2006, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Depdinas-Bappenas- Adicita Karya Nusa, Yogyakarta;
- Kerlinger, 1998. *Asas-Asas Penelitian Behaviour*, Edisi 3, Cetakan 7, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mandrivani, 2010, Anak Jalanan Merupakan Salah Satu Produk Kondisi Sosial, <http://www.mandrivani.com>
- Mantja W. 2005. *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*. Malang: Penerbit Wineka Media.
- Margono, S, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2007. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Muhmidayeli, 2007, *Teori-Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau dan LSKF2P.
- Novri, Yanti, 2010, *Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Pelatihan, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya dan Bahan Pencemar Lingkungan sebagai Salah satu Alternatif penurunan pengangguran secara berkelanjutan*, <http://novriyanti07.student.ipb.ac.id/2010>
- Ribeiro, M.O., 2008, *Street Children and their relationship with the police*, Journal Compilation International Council
- Sa'ud, Udin Syaefudin & Makmun, abin Syamsuddin, 2005, *Perencanaan Pendidikan, Suatu pendekatan Komprehensif*, PT. Semaja Rosdakarya, Bandung
- Sarjono, Yetty, 2011, *Rekonstruksi Perkotaan Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Sarjono, Yetty, 2009, *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Shamsi, Uzma R., 2011, *Critical and Innovative Pedagogies for Social Change*, Vol.1 No.1; July 2011, American International Journal of Contemporary Research
- Spradley, James P. 2005. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2007, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutikno, Sobry, 2007, *Rahasia Sukses Belajar dan Mendidik Anak Teori dan Praktek*, Penerbit NTP Press, Mataram NTB.



- Sutopo, H.B. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Suyanto Bagong, 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Prenada Media.
- Xiadong, Zeng, 2008, *Teacher Education In The Context of Social Change in China*, Submission to the International Alliance of Leading Education Institutes. International Alliance.